



PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO OPERASIONAL TAHUN 2025

**BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

RISK!

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional Bappeda Tahun 2025 dapat disusun sebagai salah satu upaya pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dokumen ini juga merupakan wujud penguatan dan peningkatan kualitas SPIP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional Bappeda Tahun 2025 ini berisikan proses pengelolaan risiko operasional yang meliputi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan Bappeda.

Temanggung, 5 November 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, MT
NIP. 19720324 199203 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan	3
4. Manfaat	3
5. Ruang Lingkup	4
BAB II. SEKILAS TENTANG SPIP	6
1. Pengertian SPIP	6
2. Tujuan SPIP	6
3. Unsur-Unsur SPIP	7
4. Pernyataan Tanggung Jawab	9
BAB III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN	11
1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan	11
2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini	11
3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian	13
BAB IV. PENILAIAN RISIKO	16
1. Penetapan Tujuan	16
2. Identifikasi Risiko	20
3. Analisis Risiko	20
BAB V. KEGIATAN PENGENDALIAN	23
BAB VI. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	25
BAB VII. PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern	12
Tabel 3.2	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian	15
Tabel 4.1	Penetapan Konteks Risiko Operasional Bappeda Kabupaten Temanggung	16
Tabel 4.2	Contoh Kriteria Penerimaan Risiko.....	20
Tabel 4.3	Daftar Penentuan Risiko Prioritas Tahun 2025.....	

DAFTAR LAMPIRAN

- Form 1A. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern
Control Environment Evaluation (CEE)
- Form 1B. CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
- Form 1C. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
- Form 2C. Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD
- Form 3C. Identifikasi Risiko Operasional OPD
- Form 4. Hasil Analisis Risiko
- Form 5. Daftar Risiko Prioritas
- Form 6. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)
- Form 7. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)
- Form 8. Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun
- Form 9. Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, menyusun Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Bappeda Kabupaten Temanggung, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam proses bisnis di Bappeda Kabupaten Temanggung.

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Bappeda Kabupaten Temanggung sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Bappeda Kabupaten Temanggung telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu

rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Tujuan tersebut dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Bappeda Kabupaten Temanggung memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Bappeda Kabupaten Temanggung. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yaitu sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata keleola pemerintahan yang baik.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RTP pada Bappeda Kabupaten Temanggung adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 4) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
- 5) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
- 6) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

- 7) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- 8) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 9) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- 10) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

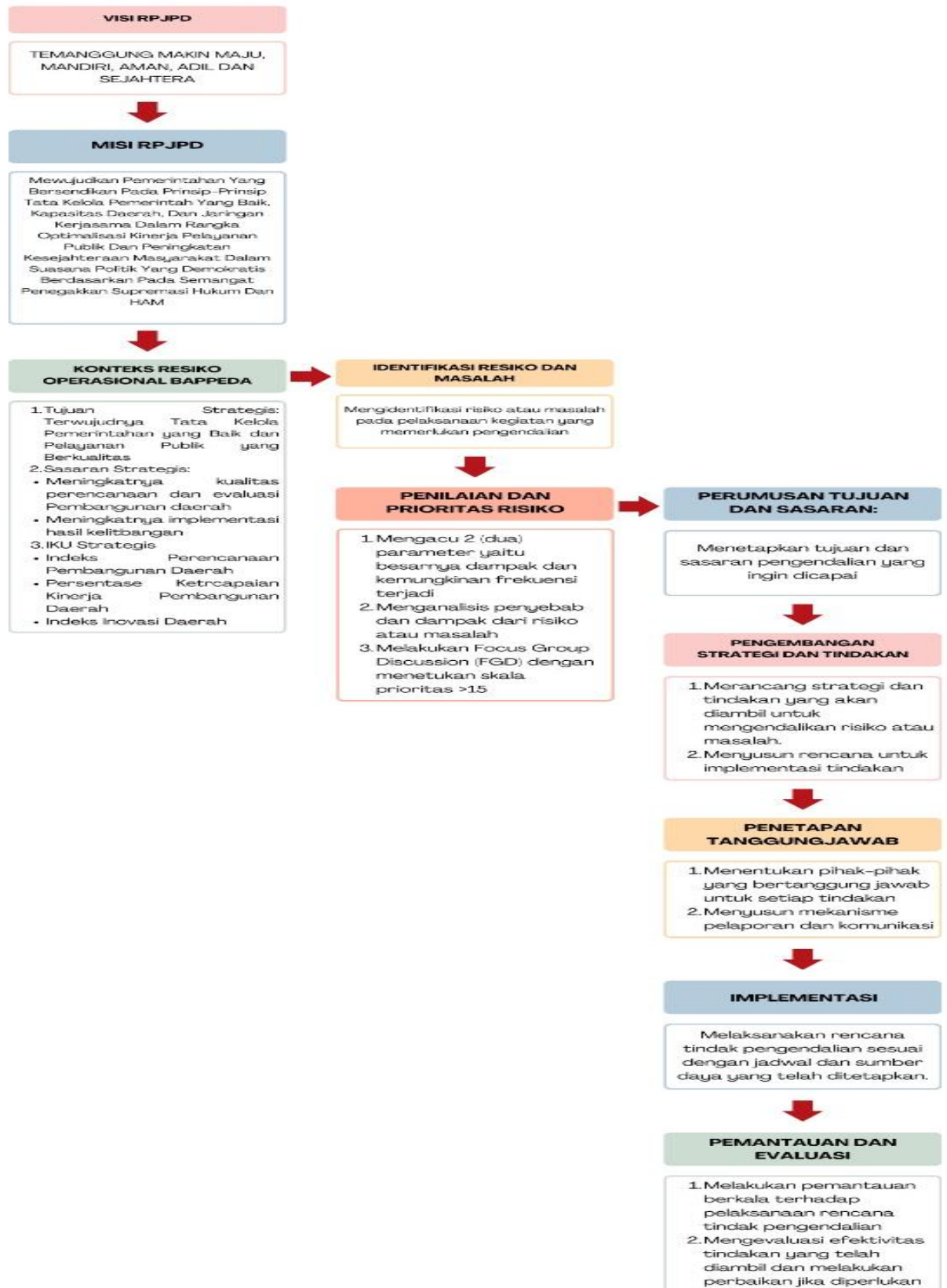
Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Bappeda Kabupaten Temanggung untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan bertujuan untuk memastikan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.4 MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen RTP di Bappeda Kabupaten Temanggung antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP; dan
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.

1.5 RUANG LINGKUP



Rencana Tindak Pengendalian ini berfokus pada pengendalian atas kegiatan Bappeda Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah;
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
6. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
7. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
8. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
10. Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
11. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah.

Penilaian lingkungan pengendalian intern Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan hasil rekapitulasi evaluasi lingkungan pengendalian yang telah dilakukan seluruh pegawai sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) ASN di lingkungan Bappeda Kabupaten Temanggung. Identifikasi risiko Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan hasil dari identifikasi kegiatan-kegiatan dibidang yang dilakukan oleh masing-masing pemilik risiko. Sedangkan penilaian risiko merupakan hasil pemetaan dari risiko yang terpilih.

Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melalui *Forum Group Discussion* (FGD) yang melibatkan seluruh jajaran baik pimpinan maupun pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Temanggung.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1 PENGERTIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2 TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan risiko Bappeda Kabupaten Temanggung dilakukan atas kegiatan. Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

- a. Pengembangan budaya sadar risiko

Pengembangan pemahaman risiko kepada pegawai telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi baik di tingkat Perangkat Daerah. Selain itu juga melakukan internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan

keputusan di seluruh tingkatan serta pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko

Unit Pemilik Risiko memiliki tugas menyusun strategi pengelolaan risiko, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko, melakukan identifikasi dan analisis risiko, kegiatan penanganan dan pemantauan risiko dan menatausahakan proses pengelolaan risiko.

c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko sebagaimana diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Dengan setiap siklus mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Proses pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

2.3 UNSUR - UNSUR SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, dan 5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Bappeda Kabupaten Temanggung berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan pemerintahan Bappeda Kabupaten Temanggung.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Bappeda Kabupaten Temanggung untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Bappeda Kabupaten Temanggung sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada sasaran strategis / kegiatan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi

internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bappeda Kabupaten Temanggung juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Temanggung memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Bappeda Kabupaten Temanggung terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan kebijakan dan prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

2.4 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (STATEMENT OF RESPONSIBILITIES)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (4) mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah

diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen RTP.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan pengendalian Bappeda Kabupaten Temanggung bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- b. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- c. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- e. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. Kondisi Lingkungan Pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Bappeda Kabupaten Temanggung, diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Kurang Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat	Kurang Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Sumber: Form 1a CEE KK RTP Operasional Bappeda Tahun 2025

Survei persepsi yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung melibatkan ASN pada Bappeda Kabupaten Temanggung sebagai responden. Responden ditetapkan seluruh ASN sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional dan staf pelaksana.

Dari 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika
Dengan kelemahan kurangnya kesadaran pegawai tentang kode etik, pakta integritas dan aturan pegawai.
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
Dengan kelemahan evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai belum optimal, kurangnya pelatihan/diklat bagi pegawai, dan kurangnya pelatihan terkait pengelolaan risiko yang memadai bagi pegawai.
- 3) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
Dengan kelemahan masih terdapat pegawai tidak tetap (tenaga pendukung).
- 4) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
Dengan kelemahan belum dilakukan reviu/evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggung jawab bawahan.

- 5) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Dengan kelemahan masih terdapat pegawai tidak disiplin belum ditindaklanjuti secara optimal, belum adanya pemberian sistem *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan risiko bagi pegawai, dan kegiatan pengembangan SDM hanya ada di dinas terkait yang membidangi pelatihan.

3.3 RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

Tabel 3.2
Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu
A. PENEGAKKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA				
1	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai			
	Kurangnya pemahaman pegawai tentang kode etik, pakta integritas dan aturan pegawai	Mensosialisasikan kode etik kepada seluruh pegawai	Kepala Bappeda	Bulanan/ Triwulanan 2025
2	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku			
	Masih ada pegawai yang tidak disiplin belum ditindaklanjuti secara optimal	Menindaklanjuti pegawai yang tidak disiplin dan melakukan penyimpangan terhadap pelanggaran kode etik dan aturan kepegawaian sesuai ketentuan	Sekretaris Bappeda	Bulanan/ Triwulanan 2025

B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI				
1	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan			
	Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai belum optimal	Melaksanakan evaluasi kinerja pegawai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun berdasarkan tuisi dan Perjanjian Kinerja	Sekretaris BAPPEDA	Bulanan/ Triwulanan 2025
2	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai			
	Keterbatasan dalam pelaksanaan diklat pegawai	Mengikuti sertakan pegawai dalam pelatihan/diklat yang berkaitan dengan perencanaan sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai yang diselenggarakan pihak tertentu	Sekretaris Bappeda	Semester n 2025
3	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala			
	Belum ada pelatihan terkait pengelolaan resiko yang memadai bagi pegawai	Melakukan upaya pemberian reward dan atau punishmen bagi pegawai atas pengeloasn risiko pekerjaan yang baik	Sekretaris Bappeda	Semester I 2024
C PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN				
1	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)			
	Masih terdapat pegawai tidak tetap (tenaga pendukung)	Mengevaluasi struktur organisasi yang ada dan disesuaikan dengan ketentuan	Sekretaris Bappeda	Semester II 2024

D PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB				
1	Kewenangan direviu yang terjadwal			
	Belum seluruhnya review/evaluasi dilakukan secara berjenjang terhadap peran dan tanggungjawab bawahan	Melaksanakan reviu, evaluasi kinerja pegawai sampai level bawah secara periodik terhadap peran dan tanggungjawab bawahannya terkait SPIP dengan memberikan pemahaman kepada pegawai tusi organisasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah	Sekretaris Bappeda	Semesteran 2024
E PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risikodalam penilaian kinerja)			
1.	Terbatasnya sistem reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko bagi pegawai	Melakukan upaya pemberian reward dan/atau punishmen bagi pegawai atas pengeloasn risiko pekerjaan yang baik	Kepala Bappeda	Triwulanan I, dan IV 2024
	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM			
2.	Kegiatan pengembangan SDM hanya ada di dinas terkait yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kepegawaian	Mengikutsertakan pegawai dalam peatihan guna pengembangan SDM baik di instansi atau pihak yang memiliki kompetensi	Sekretaris Bappeda	Semester I dan IV 2024

Sumber: Form 6 KK RTP Operasional Bappeda Tahun 2025

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.A : Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.B : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

Form 1.C : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. PENETAPAN TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pengelolaan risiko perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pada RPD Tahun 2024-2026 mengacu pada visi, misi, sasaran pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Periode Pertama pada RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 juga berdasarkan pada analisis isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa daerah perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan Renja pada masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah kemudian diterjemahkan dalam program kegiatan sebagai pendukung ketercapaian target yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Bappeda Kabupaten Temanggung menetapkan konteks risiko operasional sebagai berikut:

Tabel 4.1

Penetapan Konteks Risiko Operasional Bappeda Kabupaten Temanggung

Tujuan, Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risik	Tujuan Strategis		
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi		
	Program		Indikator
	1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu
			Persentase tersusunnya laporan

		evaluasi pembangunandaerah tepat waktu
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Pembangunan Manusia
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Infrastruktur
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian
		Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi, kinerja, evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah
Kegiatan		
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Pelaporan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Yang Dipublikasikan
3.	Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
4.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Bidang Manusia
5.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Bidang Perekonomian
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan

		Koordinasi Bidang SDA
	6. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Bidang Infrastruktur
	7. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Peraturan Pemerintahan
		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan Yang Dikelola Dengan Baik
	8. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pemanfaatan IPTEK bidang Sosial dan Kependudukan
	9. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan IPTEK dan Jumlah Laporan Pelaksanaan HAKI
	10. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan:	
	1. Koordinasi Peelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kepada Kabupaten dan APBD Kabupaten Kepada Desa
	2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota Yang Ditetapkan (RPD dan RPJMD)
	3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Yang Diterbitkan
	4. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
	5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD)
	6. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD)

	7. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD)
	8. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD)
	9. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD)
	10. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	11. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	12. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	13. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	14. Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
	15. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan Yang Terkelola Dengan Baik

	16. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
	17. Penelitian dan Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Dibidang Teknologi dan INovasi
	18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber: Form 2c KK RTP Operasional Bappeda

4.2. IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Rincian dari identifikasi yang dilakukan ditunjukkan pada lampiran:

Form 3.C : Identifikasi Risiko Operasional Bappeda Kabupaten Temanggung

Tabel 4.2
Contoh Kriteria Penerimaan Risiko

No	Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1	1 – 2 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
2	3 – 4 (Rendah)	Dapat diterima
3	6 – 9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
4	12 – 16 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Sumber: Perbup Temanggung No 7 Tahun 2022

4.3. ANALISIS RISIKO

4.3.1. ANALISIS KEMUNGKINAN DAN DAMPAK RISIKO

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4 (empat). Dari hasil analisis risiko tersebut melalui FGD maka diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai tinggi sampai dengan tinggi. Berikut adalah daftar penentuan risiko prioritas dari hasil analisis risiko Bappeda Kabupaten Temanggung :

Tabel 4.3
Daftar Penentuan Risiko Prioritas Tahun 2025

No.	Risiko	Kode Risiko	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	RKPD kurang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat	ROO.KBJ1 25.03.36. 28.01	12	Sangat Tinggi
2	Ketidaksiesuaian administrasi perjalanan dinas	ROO.F1. 25.03.36.28.02	12	Sangat Tinggi
3	Input data di aplikasi SIPD e-walidata yang belum sesuai dengan kebijakan	ROO.KBJ2. 25.03.36.28.01	16	Sangat Tinggi
4	Ketidaksiesuaian pembiayaan fasilitasi rapat	ROO.F2. 25.03.36.28.01	12	Sangat Tinggi
5	Input kinerja pembangunan masih secara manual	ROO.KBJ3. 25.03.36. 28.02	16	Sangat Tinggi
6	Belum ada kibijakan atau juknis terkait KKN	ROO.KBJ7. 25.03.36. 28.03	12	Sangat Tinggi
7	Administrasi forum TJSPL yang belum optimal	ROO.KBJ7. 25.03.36. 28.04	16	Sangat Tinggi
8	Belum optimalnya koordinasi dengan BPKPAD terkait pengaturan bantuan dari pihak ketiga	ROO.KBJ7. 25.03.36. 28.05	16	Sangat Tinggi

No.	Risiko	Kode Risiko	Skala Risiko	Tingkat Risiko
9	Terdapat asset terkait bantuan kepada masyarakat yang belum dilaporkan	ROO.KBH7. 25.03.36. 28.01	9	Tinggi
10	Penyalahgunaan kewenangn dalam dalam penentuan Lokasi KKN	ROO.F7. 25.03.36. 28.01	12	Tinggi
11	Belum optimalnya Forum TFSLP memberikan bantuan kepada masyarakat	ROO.F7. 25.03.36. 28.02	9	Tinggi
12	Kesalahan administrasi dalam pemberian hadiah lomba KRENOVA	ROO.R8. 25.03.36. 28.01	12	Sangat Tinggi
13	Dokumen RTP Bappeda belum optimal	ROO.KBJ9.. 25.03.36. 28.01	9	Tinggi
14	Belum teridentifikasinya risiko sesuai kebijakan	ROO.KBJ9.. 25.03.36. 28.01	12	Sangat Tinggi

Sumber: Form 5 KK RTP Operasional Bappeda Tahun 2025

Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (*preventif*), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (*mitigatif*, atau keduanya. Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran form 5 (lima).

Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada selanjutnya dinilai efektifitasnya yang ditunjukkan pada lampiran form 6 dan 7. Pengendalian yang dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan;
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatas.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian untuk mengatasi risiko prioritas antara lain sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan perbaikan dan perubahan dokumen perencanaan (RKPD) sesuai kebijakan;
- 2) Melengkapidata dukung dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan dan mengoptimalkan tugas pokok fungsi dari verifikator keuangan;
- 3) Fasilitasi Pendampingan kepada Perangkat Daerah pada pelaksanaan kegiatan e-walidata;
- 4) Menyusun dan menindaklanjuti Berita Acara hasil Desk dan mengoptimalkan aplikasi Pena Kita;
- 5) Optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait;
- 6) Menyusun Rencana Kerja Forum TJSLP dan membuat laporan kegiatan;
- 7) Pencatatan, pendataan secara berkala dan pelaporan asset bantuan yang diberikan kepada masyarakat pada instansi terkait;
- 8) Pembuatan SK Bupati terkait penerimaan hadiah KRENOVA;
- 9) Penataan dan fasilitasi kegiatan universitas dalam pengabdian masyarakat, KKN, magang dan sebagainya;
- 10)Fasilitasi pendampingan RTP, menyusun laporan evaluasi dan monitoring RTP Strategis dan operasional Bappeda;

- 11)Menyusun RTP Startegis dan operasional berdasarkan 6 (enam) kategori risiko;
 - 12)Menyusun Juknis atau SOP terkait pelaksanaan KKN;
 - 13)Menyusun temaktik Lokasi KKN.
2. Pelaksanaan Kebijakan dan prosedur pengendalian
- Semua bentuk pengendalian yang telah dibuat instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur kedalam kegiatan operasional yang harus ditaati.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah rencana tindak pengendalian dalam rangka mengatasi risiko yang ada disepakati, Bappeda Kabupaten Temanggung perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak - pihak terkait misalnya pegawai, Perangkat Daerah terkait dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Bappeda Kabupaten Temanggung merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP yang ditunjukkan pada form 8 (delapan).

BAB VII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Rencana Tindak Pengendalian Operasional Bappeda tidak lepas dari Rencana Tindak Pengendalian Strategis Pemerintah Daerah dan Rencana Tindak Pengendalian Strategis Bappeda. Rencana Tindak Pengendalian Operasional Bappeda disusun berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025.

Berdasarkan form yang telah disusun, terdapat 10 (sepuluh) risiko operasional yang menjadi risiko prioritas Bappeda Kabupaten Temanggung.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Operasional ini akan menjadi dokumen yang terus – menerus mengalami penyesuaian dengan perkembangan kondisi terkini untuk penyempurnaan SPIP yang berkelanjutan di Bappeda Kabupaten Temanggung. Dengan hal tersebut maka diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang ada pada dokumen Rencana Tindak Pengendalian Operasional Bappeda Kabupaten Temanggung. Sehingga pemantauan atas pelaksanaan sesuai dengan Rencana Tindak Pengendalian yang telah ditetapkan ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan kebijakan pertanggungjawaban atau *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Selanjutnya Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Bappeda Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya dalam rangka

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026, yang didukung dari komitmen seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Temanggung, 5 November 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, MT
NIP. 19720324 199203 1 003

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/90 TAHUN 2024

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah perlu dibentuk Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Pengelolaan Risiko Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Struktur Pengelolaan Risiko Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:
- a. Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - b. Sekretaris Bappeda sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Bappeda, yaitu :
 1. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. Memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 4. Melakukan koordinasi kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.
 - c. Unit Pemilik Risiko, memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam

unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi kemungkinan risiko di masa yang akan datang;


4. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
 6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Bappeda;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Bappeda, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian tingkat Bappeda; dan
 - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Bappeda yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Bappeda.
 2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Bappeda;
 - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Bappeda, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Bappeda yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Bappeda; dan
 - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Bappeda c.q. Sekretaris Bappeda.
 3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Bappeda;
 - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Bappeda, antara lain Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan

- c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Bappeda yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Bappeda.
- e. Perencana Madya dan Perencana Muda sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Bappeda, yaitu:
 1. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
 4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Bappeda c.q. Sekretaris Bappeda.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Oktober 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,


HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720314 199203 1 003

Tembusan :

1. Pj. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Temanggung (sebagai laporan).

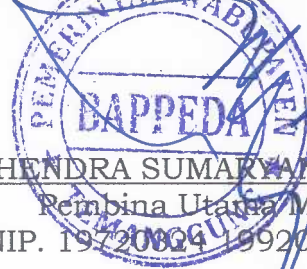
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 050/90 TAHUN 2024
 TANGGAL 30 OKTOBER 2024

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
 BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
A.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO	
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Penanggung Jawab
B.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO	
	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator
C.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) BAPPEDA	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Ketua
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Koordinator Merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
D.	KOMITE PENGELOLA RISIKO	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Ketua
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Koordinator
3.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
E.	UNIT KEPATUHAN	
1.	Perencana Madya Bappeda	Koordinator
2.	Perencana Muda Sekretariat	Anggota
3.	Perencana Muda Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Anggota

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720804 199203 1 003

**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG**

Tahun Penilaian: 2025

NO	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																																			SIMPULAN KUISIONER CEE						
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35		R36	R37	R38	R39	Modus	
a	b	c																																			d						
A PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																																					3	Kurang Memadai					
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	Kurang Memadai		
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	2	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	4	3	3	3	3	4	3	Memadai		
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	2	3	2	3	2	2	3	4	3	4	3	2	3	4	3	3	4	4	3	3	2	2	3	4	4	4	4	3	3	3	1	2	3	2	3	3	2	3	3	Memadai	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	4	3	3	3	2	3	3	2	1	3	Memadai	
B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																																					3	Kurang Memadai					
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	2	3	3	3	3	4	2	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	2	3	3	2	2	4	4	4	2	4	4	3	4	3	2	3	3	3	2	3	4	3	Memadai	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	Memadai		
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	2	3	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	Kurang Memadai	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	1	2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	2	1	3	2	3	2	2	2	3	2	1	1	3	2	3	2	2	2	Kurang Memadai	
C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																																					3	Memadai					
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	2	3	3	2	3	1	3	3	3	3	3	1	2	4	4	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	3	4	3	3	3	3	1	3	3	3	2	2	4	3	Memadai	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	4	3	3	3	2	1	4	4	4	3	4	3	3	3	3	1	3	3	3	2	2	4	3	Memadai	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	4	3	3	3	3	1	3	4	4	3	4	3	3	3	3	1	3	2	3	2	2	4	3	Memadai	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	3	3	2	4	2	3	3	3	3	2	2	2	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	3	3	4	3	3	4	2	1	3	2	3	2	3	4	3	Memadai		
5	Pimpinan menetapkan sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	3	1	3	3	3	2	3	4	3	Memadai			
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (cascading)	3	3	4	4	4	4	1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	Memadai		
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	2	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	1	3	3	3	2	3	4	3	Memadai		
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	4	3	3	3	2	2	3	4	4	3	4	3	4	4	3	2	3	3	3	2	3	4	3	Memadai	
D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																																					3	Kurang Memadai					
1	Setiap urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	2	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	2	3	4	4	4	4	3	4	4	3	2	3	3	3	3	4	3	Memadai

2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	2	4	3	3	4	1	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	2	3	3	3	3	2	4	3	Memadai	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	1	2	3	2	2	3	1	2	3	3	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	Kurang Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	2	3	4	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	2	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	Memadai	
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																													3	Kurang Memadai												
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	2	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	4	Memadai		
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	2	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	1	3	3	3	2	3	4	Memadai			
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	2	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	1	3	2	3	2	3	2	Kurang Memadai				
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																													3	Kurang Memadai												
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	3	4	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	1	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	4	Memadai	
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	1	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	4	3	3	2	3	3	1	2	2	1	3	3	4	3	3	4	3	4	3	2	3	2	3	2	2	1	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	2	3	4	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	2	3	3	2	1	4	1	3	3	4	3	4	4	3	2	3	3	3	3	3	2	1	Memadai	
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	1	3	4	4	3	4	3	3	2	2	4	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	Memadai		
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	1	3	3	2	3	2	2	2	3	1	1	3	1	3	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	Kurang Memadai	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	2	2	3	2	1	3	1	4	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	1	Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	1	1	3	1	3	3	2	2	3	2	3	1	3	2	3	2	2	1	Kurang Memadai		
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																													3	Memadai												
1	Inspektorat Daerah melakukan rewiu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan rewiu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	4	3	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	2	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	Memadai	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	2	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	2	4	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																													3	Memadai												
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	4	4	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Memadai	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	Memadai	

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket. Jawaban:

- 1 Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun
- 2 Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan:

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "Memadai", dan "Kurang Memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Seluruh ASN untuk penilaian Risiko Strategis OPD

**CEE BERDASARKAN DOKUMEN
KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
DI BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nama PD : Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian : 2025

No.	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Absensi Pegawai, Teguran Lisan, Surat Teguran	Penerapan tentang kode etik, pakta integritas dan aturan pegawai belum optimal	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
2	Surat Usulan Coaching	Masih ada pegawai yang tidak disiplin belum ditindaklanjuti secara optimal	
3	Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai belum optimal	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
4	Dokumentasi Data Pelatihan	Kurangnya pelatihan/diklat untuk menunjang kompetensi kinerja pegawai	
5	Database ASN	Belum ada pelatihan terkait pengelolaan risiko yang memadai bagi pegawai	
6	Data Tenaga Non PNS	Masih terdapat pegawai tidak tetap (tenaga pendukung kegiatan)	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
7	Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Belum seluruhnya pegawai direviu/evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggungjawab bawahan	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB YANG TEPAT
8	Evaluasi Kinerja	Terbatasnya sistem reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko bagi pegawai	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
9	Perbup tentang Tugas dan Fungsi	Kegiatan pengembangan SDM hanya ada di dinas terkait yang membidangi pelatihan	

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
DI BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nama PD : Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian : 2025

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang Memadai	Masih ada pegawai yang tidak disiplin belum ditindaklanjuti secara optimal Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai belum optimal	Kurang Memadai	Aturan perilaku pegawai telah dikomunikasikan namun belum sepenuhnya diterapkan oleh pegawai Masih ada pegawai yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya	Kurang Memadai	1. Masih ada pegawai yang tidak sesuai aturan pegawai 2. Teguran lisan pada saat apel pagi 3. Teguran tertulis 4. Pemotongan TPP sesuai kehadiran apel pagi/pulang cepat/izin/cuti 5. Masih ada pegawai yang tidak disiplin belum ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang memadai	Kurangnya pelatihan/diklat untuk menunjang kompetensi kinerja pegawai Belum ada pelatihan terkait pengelolaan risiko yang memadai bagi pegawai Masih terdapat pegawai tidak tetap (tenaga pendukung kegiatan)	Kurang Memadai	Telah memiliki pegawai yang berkompeten tetapi masih ada beberapa pegawai yang belum naik jabatan	Kurang Memadai	1. Masih ada pegawai yang berkompeten/memenuhi syarat tetapi belum naik jabatan 2. Masih ada pegawai yang belum ikut diklat 3. Belum ada pelatihan bagi pegawai terkait pengelolaan risiko
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai		Memadai		Memadai	
4	Pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan	Kurang Memadai	Belum seluruhnya pegawai direviu/evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggungjawab bawahan	Kurang Memadai	Masih ada pegawai yang bertugas di Bappeda merupakan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	Kurang Memadai	Masih ada pegawai yang bertugas di Bappeda merupakan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Kurang Memadai	Terbatasnya sistem reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko bagi pegawai	Kurang Memadai	Belum ada evaluasi kinerja pegawai secara berjenjang terhadap peran dan tanggungjawab	Kurang Memadai	1. Sesuai Permenpan RB No. 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, pengukuran kinerja seharusnya dilaksanakan sampai level individu 2. Belum dilakukannya evaluasi tugas pokok dan fungsi
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai	Kegiatan pengembangan SDM hanya ada di dinas terkait yang membidangi pelatihan	Kurang Memadai	Belum ada pegawai yang mendapatkan reward/punishment terkait pengelolaan risiko	Kurang Memadai	1. Belum ada pemberian reward dan/atau punishment bagi pegawai atas pengelolaan risiko 2. Tugas dan fungsi untuk pengembangan SDM hanya ada di dinas terkait yang membidangi pelatihan
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai		Memadai		Memadai	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai		Memadai		Memadai	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan awal penilaian berdasarkan reviu dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal berdasarkan reviu dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan survei CEE atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian

Kolom f diisi dengan uraian simpulan survei CEE atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian

Kolom g diisi dengan simpulan fasilitator atas kondisi masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian

Kolom h diisi dengan penjelasan simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian sesuai dengan kolom g

FORMULIR KERTAS KERJA

EVALUASI ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN/ RTP ATAS KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN (RTP ATAS CEE

Nama PD : Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian : 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
A PENEKAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA				
1	Kurangnya pemahaman pegawai tentang kode etik, pakta integritas dan aturan pegawai	Mensosialisasikan kode etik kepada seluruh pegawai	Kepala Bappeda	Bulanan dan Triwulanan 2025
2	Masih ada pegawai yang tidak disiplin belum ditindaklanjuti secara optimal	Menindaklanjuti pegawai yang melakukan penyimpangan terhadap pelanggaran kode etik dan aturan pegawai	Kepala Bappeda	Bulanan dan Triwulanan 2025
B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI				
1	Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai belum optimal	Melaksanakan evaluasi kinerja pegawai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun berdasarkan tugas dan Perjanjian Kinerja	Kepala Bappeda	Triwulanan 2025
2	Keterbatasan dalam pelaksanaan diklat pegawai	Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan/diklat yang berkaitan dengan perencanaan sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai	Kepala Bappeda	Semesteran 2025
3	Belum ada pelatihan terkait pengelolaan risiko yang memadai bagi pegawai	Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan/diklat yang berkaitan dengan pengelolaan risiko sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai	Kepala Bappeda	Semester I 2025
C PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN				
1	Masih terdapat pegawai tidak tetap (tenaga pendukung kegiatan)	Menyevaluasi struktur organisasi yang ada dan disesuaikan dengan ketentuan	Kepala Bappeda	Semester II 2025
D PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB YANG TEPAT				
1	Belum seluruhnya pegawai direviu/evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggungjawab bawahan	Melaksanakan reviu, evaluasi kinerja pegawai sampai level bawah secara periodik terhadap peran dan tanggungjawab bawahannya terkait SPIP dengan memberikan pemahaman kepada pegawai tentang tugas organisasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah	Kepala Bappeda	Semesteran 2025
E PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Belum ada pemberian sistem reward dan/punishment bagi pegawai atas pengelolaan risiko	Melakukan upaya pemberian reward dan atau punishment bagi pegawai atas pengelolaan risiko pekerjaan yang baik	Kepala Bappeda	Triwulan I dan IV 2025
2	Kegiatan pengembangan SDM hanya ada di dinas terkait yang membidangi pelatihan	Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan guna pengembangan SDM baik di anggaran pemerintah maupun swasta	Kepala Bappeda	Semester I dan IV Tahun 2025

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama PD	: Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Renja 2025
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sumber Data	Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2025
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah
Program Bappeda (Renja 2025) dan Kegiatan/Sub Kegiatan Utama	Program
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	4 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Kegiatan
	1 Administrasi Keuangan Daerah
	2 Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	6 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	7 Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	8 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	9 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	10 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	11 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	12 Penelitian Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
	13 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
	Sub Kegiatan
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5 Fasilitas Kunjungan Tamu
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
9 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
10 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
13 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
14 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	
15 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
16 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
17 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
18 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
19 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	
20 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
21 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
22 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
23 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
24 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

25	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
26	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
27	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
28	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
29	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Keluaran/Hasil Sub Kegiatan	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan
	2	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	1 Paket
	5	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
	6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
	7	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
	8	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
	9	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	10	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan
	11	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit
	12	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	2 Unit
	13	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen
	14	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen
	15	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4 Buku
	16	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan
	17	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	94 Dokumen
	18	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan
	19	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD	23 Dokumen
	20	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	7 Laporan
	21	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	13 Dokumen
	22	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	5 Laporan
	23	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
	24	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen
	25	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	5 Laporan
	26	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan
	27	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	3 Data
	28	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi	2 Dokumen
	29	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program		
	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan		
	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	3	Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	4	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	5	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
	6	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	7	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	
	8	Penelitian Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
	9	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
	10	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan		
	1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
	2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	

4	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
8	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
9	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
10	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
11	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
12	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
13	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
14	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	
15	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
16	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
17	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan		
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan
2	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen
3	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4 Buku
4	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan
5	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	94 Dokumen
6	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan
7	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23 Dokumen
8	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	7 Laporan
9	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13 Dokumen
10	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	5 Laporan
11	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
12	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen
13	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	5 Laporan
14	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	1 Laporan
15	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	3 Data
16	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi	2 Dokumen
17	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen
18	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen

**FORMULIR KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nama PD : Bappeda Kabupaten Temanggung
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Renja 2025
 Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi
 Sasaran Strategis OPD : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Kategori Risiko	Tahap	Uraian		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	PERENCANAAN											
A	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											
1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Risiko Kebijakan	Perencanaan	RKPD kurang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat	ROO.KBJ1. 25.03.36.28.01	Kepala Bidang PEIPD	Regulasi kebijakan pemerintah pusat dikeluarkan setelah dokumen perencanaan pembangunan daerah ditetapkan	Eksternal	UC	Kualitas perencanaan yang tidak optimal	1. Pemda 2. Perangkat Daerah 3. Masyarakat
2				Pelaksanaan	Target kinerja pada program prioritas dalam dokumen RKPD tidak terlaksana dengan baik	ROO.KBJ1. 25.03.36.28.02		Pendanaan tidak sesuai dalam mendukung target kinerja pada program prioritas dalam dokumen RKPD	Internal	C	Pembangunan Daerah yang tidak optimal	
3				Pelaksanaan	Koordinasi dengan pemerintah provinsi pusat belum optimal	ROO.KBJ1. 25.03.36.28.03		Belum optimalnya kordinasi dengan pemerintah provinsi/pusat	Internal dan Eksternal	C	Dokumen RKPD belum sesuai dengan ketentuan	
4				Evaluasi	Kesulitan dalam mengukur kinerja	ROO.KBJ1. 25.03.36.28.04		1. Terdapat perubahan kebijakan dari pusat/provinsi 2. Data yang digunakan tidak up-to-date 3. Terdapat perubahan pendanaan 4. LHE dari Inspektorat 5. Hasil fasilitasi Berita Acara dari Provinsi	Internal dan Eksternal	C	Dokumen perencanaan yang tidak akurat	
5			Risiko Kepatuhan	Pelaksanaan	Mengabaikan kebijakan terkait tata cara penyusunan dokumen perencanaan	ROO.KPH1. 25.03.36.28.01		Pemahaman Tim Penyusun belum optimal tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan	Internal	C	Kualitas perencanaan yang tidak optimal	
6			Risiko legal	Pelaksanaan		-			-	-	-	
7			Risiko Fraud	Pelaksanaan	Pembiayaan proses pelaksanaan pemesanan makan minum untuk rapat yang belum optimal	ROO.F1. 25.03.36.28.01		1. Belum optimalnya data dukung administrasi 2. Persepsi pemahaman administrasi yang masih kurang 3. Terbatasnya SDM verifikasi administrasi	Internal	C	Administrasi yang belum sesuai dengan kebijakan	
8				Pelaksanaan	Ketidaksesuaian administrasi perjalanan dinas	ROO.F1. 25.03.36.28.02		1. Kehadiran personil yang berlebih 2. Data dukung administrasi yang belum lengkap	Internal	C	Tidak keefisienannya pelaksanaan kegiatan dan anggaran	
9			Risiko Reputasi	Pelaksanaan	Tingkat reputasi Bappeda rendah terhadap kevalidan data perencanaan pembangunan	ROO.R1. 25.03.36.28.01		Informasi yang tidak tepat pada keakuratan data	Internal	C	Ketidapercayaan masyarakat dan Perangkat daerah terhadap dokumen perencanaan	
10			Risiko Kemitraan	Pelaksanaan	Kerjasama atau kemitraan dengan pihak lain bisa menurun dan dapat menghentikan atau memperlambat pembangunan daerah	ROO.K1. 25.03.36.28.01		Keterbatasan sumber daya untuk perencanaan pembangunan daerah	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pembangunan daerah	
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											
11	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Risiko Kebijakan	Perencanaan	Input data di aplikasi SIPD e-walidata yang belum sesuai dengan kebijakan	ROO.KBJ2. 25.03.36.28.01	Kepala Bidang PEIPD	1. Kebijakan baru dari Pusat untuk memenuhi permintaan data yang harus segera dilaksanakan oleh daerah 2. Definisi operasional dalam aplikasi belum lengkap	Internal dan Eksternal	C	Perangkat daerah belum optimal dalam mencukupi permintaan data yang dibutuhkan	1. Pemda 2. Perangkat Daerah 3. Masyarakat
12				Pelaksanaan	Mengidentifikasi data berdasarkan urusan yang belum sesuai	ROO.KBJ2. 25.03.36.28.02		Ketersediaan pengisian data masih kompleks	Internal	C	1. Proses identifikasi data menjadi rumit dan butuh waktu lama 2. Belum jelas terkait standar pengisian data berdasarkan kewenangan daerah	
13				Pelaksanaan	Belum optimalnya melaksanakan desk dengan perangkat daerah	ROO.KBJ2. 25.03.36.28.03		Ketersediaan data yang belum lengkap	Internal	C	Data dan informasi yang tidak lengkap	

14				Pelaksanaan	Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi belum optimal	ROO.KBJ2. 25.03.36.28.04			Penjelasan dari definisi operasional pada data tidak sepenuhnya terjawab dengan jelas	Internal	C	Kesesuaian data yang diinput belum maksimal	
15				Evaluasi	Belum optimalnya hasil rapat evaluasi e-walidata dengan Perangkat Daerah	ROO.KBJ2. 25.03.36.28.05			Terdapat kesulitan Perangkat Daerah pada pegisian data dan mendefinisikan dari kriteria data yang akan diinput	Internal dan Eksternal	C	Pemahaman pengisian data yang berbeda-beda	
16			Risiko Kepatuhan	Pelaksanaan	Ketidaksesuaian input data di SIPD e-walidata	ROO.KPH2. 25.03.36. 28.01			1. Terdapat Perangkat Daerah yang belum mempunyai database yang akurat 2.Data yang diminta belum diolah Perangkat Daerah dengan benar	Eksternal	C	Data dan Informasi yang dipublikasikan tidak akurat	
17			Risiko Legal	Pelaksanaan	-	-			-	-	-	-	
18			Risiko Fraud	Pelaksanaan	Ketidaksesuaian pembiayaan fasilitasi rapat	ROO.F2. 25.03.36.28.01			Ketidaksesuaian antara administrasi dengan jenis pemesanan	Internal	C	Terjadinya pemborosan pembiayaan peklaksanaan kegiatan	
19			Risiko Reputasi	Pelaksanaan	Penurunan tingkat reputasi Bappeda karena tidak dianggap profesional oleh masyarakat dan Perangkat Daerah terhadap keakuratan data	ROO.R2. 25.03.36.28.01			Informasi yang tidak tepat pada keakuratan data	Internal	C	Ketidapercayaan masyarakat dan Perangkat daerah terhadap Bappeda	
20			Risiko Kemitraan	Pelaksanaan	Kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi terhadap Pemerintah Daerah menurun	ROO.K2. 25.03.36.28.01			Ketepatan waktu dan kesesuaian data yang diinput belum maksimal	Eksternal	C	Nilai kinerja pemerintah daerah menurun	
3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah													
21	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Risiko Kebijakan	Perencanaan	Kesesuaian Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Pusat belum maksimal	ROO.KBJ3. 25.03.36.28.01	Kepala Bidang PEIPD		Adanya kebijakan baru dari pusat/nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah	Eksternal	UC	Data monev pembangunan tidak terpenuhi dan realisasi kegiatan tidak terukur secara akurat	1. Pemd 2. Perangkat Daerah 3. Masyarakat
22				Pelaksanaan	Input kinerja pembangunan masih secara manual	ROO.KBJ3. 25.03.36.28.02			Aplikasi Pena Kita belum dipergunakan secara optimal	Internal	C	Laporan kinerja pembangunan belum terintegrasi	
23				Pelaksanaan	Hasil desk capaian kinerja pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah belum optimal	ROO.KBJ3. 25.03.36.28.03			Capaian kinerja pembangunan masih rendah	Internal dan Eksternal	C	Program pembangunan tidak terlaksana dengan optimal	
24			Risiko Kepatuhan	Pelaksanaan	Terdapat Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah belum optimal	ROO.KPH3. 25.03.36. 28.01			1. Terdapat Target kinerja terlalu tinggi 2. Terdapat indkitor kinerja penghitungannya kewenangan pusat / provinsi 3. Manipulasi data 4. Pengumpulan data yang tidak tepat waktu	Internal dan Eksternal	C	Nilai Kinerja Perangkat Daerah rendah	
25			Risiko Legal	Pelaksanaan	-	-			-	-	-	-	
26			Risiko Fraud	Pelaksanaan	Ketidaksesuaian pembiayaan fasilitasi rapat laporan kinerja Perangkat Darah	ROO.F3. 25.03.36. 28.01			Ketidaksesuaian antara administrasi dengan jenis pemesanan	Internal	C	Terjadinya pemborosan pembiayaan peklaksanaan kegiatan	
27			Risiko Reputasi	Pelaksanaan	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah	ROO.R3. 25.03.36. 28.01			Program pembangunan daerah tidak sesuai dengan perencanaan	Eksternal	C	Masyarakat tidak percaya dengan kerja Pemerintah Daerah	
28			Risiko Kemitraan	Pelaksanaan									
B PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia													
29	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Risiko Kebijakan	Perencanaan	Tidak semua kegiatan dalam dokumen renja PD sesuai dengan kegiatan dalam dokumen Renstra Bidang Pemerintahan	ROO.KBJ4 25.03.36.28.01	Kepala Bidang PPMP		1. Adanya kebijakan pusat/nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah	Eksternal	C	Kualitas perencanaan yang tidak optimal	1. Pemd 2. Perangkat Daerah 3. Masyarakat
30				Pelaksanaan	Pelaksanaan Forum Internal PD yang belum maksimal	ROO.KBJ4 25.03.36.28.02			1. Pemahaman Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Forum Internal PD masih kurang 2. Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang belum optimal	Internal dan Eksternal	C	Hasil dari Forum Internal PD tidak sesuai sasaran	
31				Evaluasi	Terdapat kegiatan dalam dokumen Renja belum sesuai dalam dokumen Renstra pada Bidang Pemerintahan	ROO.KBJ4 25.03.36.28.03			1. Belum optimalnya Pemahaman Perangkat Daerah terhadap keselarasan dokumen perencanaan 2. Masih terdapat kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya	Eksternal	C	Dokumen Renja dan Renstra pada bidang Pemerintahan tidak selaras	

32			Risiko Kepatuhan	Pelaksanaan	Penyusunan dokumen perencanaan tidak berdasarkan dengan Tata Cara Penyusunan dokumen perencanaan	ROO.KPH4. 25.03.36.28.01		Dokumen perencanaan Renstra dan Renja tidak selaras	Internal	C	1. Ketidakefisienan penggunaan anggaran 2. Kinerja Perangkat Daerah Menurun 3. Kesulitan dalam melaksanakan evaluasi	
33			Risiko Legal	Pelaksanaan	-	-		-	-	-	-	
34			Risiko Fraud	Pelaksanaan	Ketidaksesuaian administrasi dengan pedoman pengelolaan keuangan	ROO.F4. 25.03.36.28.01		Ketidaksesuaian data dukung administrasi dengan ketentuan pada pedoman pengelolaan keuangan	Internal	-	terjadinya pemborosan pembiayaan pelaksanaan kegiatan	
35			Risiko Reputasi	Pelaksanaan	Tingkat kepercayaan masyarakat tentang perencanaan masih rendah terhadap Bappeda	ROO.R4. 25.03.36.28.01		Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap perencanaan menjadi menurun	Eksternal	C	Menurunnya tingkat partisipasi dalam proses perencanaan	
36			Risiko Kemitraan	Pelaksanaan	-	-		-	-	-	-	
2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)												
37	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Risiko Kebijakan	Perencanaan	Tidak semua kegiatan dalam dokumen renja PD sesuai dengan kegiatan dalam dokumen Renstra Bidang Perekonomian	ROO.KBJ5. 25.03.36.28.01	Kepala Bidang PESDAI	Adanya kebijakan pusat/nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah	Eksternal	UC	Kualitas perencanaan yang tidak optimal	1. Pemda 2. Perangkat Daerah 3. Masyarakat
38				Pelaksanaan	Pelaksanaan Forum Internal PD yang belum maksimal	ROO.KBJ5. 25.03.36.28.02		1. Pemahaman Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Forum Internal PD masih kurang 2. Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang belum optimal	Internal dan Eksternal	C	Hasil dari Forum Internal PD tidak sesuai sasaran	
39				Evaluasi	Terdapat kegiatan dalam dokumen Renja belum sesuai dalam dokumen Renstra pada Bidang Perekonomian	ROO.KBJ5 25.03.36.28.03		1. Belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap keselarasan dokumen perencanaan 2. Masih terdapat kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya	Eksternal	C	Dokumen Renja dan Renstra pada Bidang Perekonomian tidak selaras	
40			Risiko Kepatuhan	Pelaksanaan	Penyusunan dokumen perencanaan tidak berdasarkan dengan Tata Cara Penyusunan dokumen perencanaan	ROO.KPH5. 25.03.36.28.01		Dokumen perencanaan Renstra dan Renja tidak selaras	Eksternal	C	1. Ketidakefisienan penggunaan anggaran 2. Kinerja Perangkat Daerah Menurun 3. Kesulitan dalam melaksanakan evaluasi	
41			Risiko Legal	Pelaksanaan	-	-		-	-	-	-	
42			Risiko Fraud	Pelaksanaan	Ketidaksesuaian administrasi dengan pedoman pengelolaan keuangan	ROO.F5. 25.03.36.28.01		Ketidaksesuaian data dukung administrasi dengan ketentuan pada pedoman pengelolaan keuangan	Internal	C	Terjadinya pemborosan pembiayaan pelaksanaan kegiatan	
43			Risiko Reputasi	Pelaksanaan	Tingkat kepercayaan masyarakat rendah tentang dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) Terhadap Bappeda	ROO.R5. 25.03.36.28.01		Tingkat partisipasi masyarakat terhadap perencanaan menjadi menurun	Eksternal	C	Menurunnya tingkat partisipasi dalam proses perencanaan	
44			Risiko kemitraan	Pelaksanaan	-	-		-	-	-	-	
3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan												
45	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Risiko Kebijakan	Perencanaan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ketepatan Waktu)	ROO.KBJ6. 25.03.36.28.01	Kepala Bidang PESDAI	1. Keterbatasan dalam sistem informasi yang mendukung pengumpulan dan analisis data serta koordinasi yang lemah 2. Belum adanya aplikasi yang dapat memantau secara realtime progres capaian kinerja 3. Kurangnya koordinasi	Eksternal	C	Pelaksanaan kegiatan yang tidak terdeteksi dan menyusutkan untuk proses perbaikan yang berkelanjutan	1. Pemda 2. Perangkat Daerah 3. Masyarakat
46				Pelaksanaan	Monitoring yang belum optimal	ROO.KBJ6. 25.03.36.28.02		Menyulitkan untuk melakukan evaluasi	Eksternal	UC	Penyajian data yang tidak valid	
47				Evaluasi	Hasil monitoring yang belum sesuai	ROO.KBJ6. 25.03.36.28.03		Kesulitan dalam mengambil keputusan	Eksternal	C	Informasi tidak sesuai sasaran	
48			Risiko Kepatuhan	Pelaksanaan	Data perencanaan hasil monitoring dari Perangkat Daerah yang tidak akurat	ROO.KPH6. 25.03.36.28.01		-	-	-	-	
49			Risiko Legal	-	-	-		-	-	-	-	
50			Risiko Fraud	-	-	-		-	-	-	-	
51			Risiko Reputasi	Pelaksanaan	Tingkat kepercayaan masyarakat terkait hasil monitoring data perencanaan Perangkat Daerah terhadap Bappeda rendah	ROO.R6. 25.03.36.28.01		Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan	Internal dan Eksternal	C	Kualitas perencanaan yang tidak optimal	
52			Risiko Kemitraan	Pelaksanaan	-	-		-	-	-	-	
II PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
C PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan												
53	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Risiko Kebijakan	Perencanaan	Bantuan kepada masyarakat tidak melalui prosedur yang berlaku	ROO.KBJ7. 25.03.36.28.01	Kepala Bidang LITBANG	Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat melalui Perangkat Daerah belum dilakukan pencatatan di aset	Eksternal dan Internal	C	Bantuan yang diterima masyarakat tidak sesuai aturan yang berlaku	1. Pemda 2. Perangkat Daerah 3.

54				Perencanaan	Penempatan KKN yang belum sesuai kebutuhan	ROO.KBJ7.25.03.36.28.02			Kurangnya koordinasi Bappeda kepada Perangkat Daerah tentang kebutuhan KKN di masyarakat	Internal dan Eksternal	C	Ketidaktepatan sasaran output terhadap masyarakat	Masyarakat
55				Pelaksanaan	Belum ada kebijakan atau Juknis terkait KKN	ROO.KBJ7.25.03.36.28.03			Jadwal pelaksanaan KKN dari Universitas berdekatan dengan pengajuan permohonan KKN		C	1. Tidak optimalnya dalam pengkoordinasian lokasi KKN 2. Pembatalan pengajuan KKN	
56				Pelaksanaan	Administrasi forum TJSLP yang belum optimal	ROO.KBJ7.25.03.36.28.04			Belum ada regulasi yang mengatur	Eksternal	C	1. Proses administrasi yang terhambat	
57				Evaluasi	Belum optimalnya koordinasi dengan BPKPAD terkait peraturan antuan dari pihak ketiga	ROO.KBJ7.25.03.36.28.05			Kurangnya pemahaman aturan pemberian bantuan dari TJSLP kepada masyarakat	Internal dan Eksternal	C	Kesalahan administrasi	
58			Risiko Kepatuhan	Pelaksanaan	Terdapat aset terkait bantuan kepada masyarakat yang belum dilaporkan	ROO.KPH7.25.03.36.28.01			Kurangnya pemahaman forum TJSLP terhadap alur pemberian bantuan	Eksternal	C	Pemberian bantuan menjadi terhambat	
59			Risiko legal	Pelaksanaan	-	-		-	-	-	-	-	
60			Risiko Fraud	Pelaksanaan	Terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam penentuan lokasi KKN	ROO.F7.25.03.36.28.01			Benturan Kepentingan antara universitas atau Bappeda dengan lokasi KKN		C	Program pelaksanaan kegiatan KKN tidak optimal	
61				Pelaksanaan	Belum optimalnya Forum TFSLP memberikan bantuan kepada masyarakat	ROO.F7.25.03.36.28.02			1. Tidak melalui prosedur 2. Kurangnya pemahaman forum TJSLP terhadap administrasi	Eksternal	C	1. Menghambat pemberian bantuan kepada masyarakat 2. Penyalahgunaan sumber daya	
62			Risiko Reputasi	Pelaksanaan	Tingkat kepercayaan pihak perusahaan kepada pmda rendah	ROO.R7.25.03.36.28.01			Menurunnya partisipasi perusahaan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat menjadi turun	Eksternal	C	Jumlah pemberian bantuan dari perusahaan menjadi turun	
63			Risiko Kemitraan	Pelaksanaan	Perusahaan enggan memberikan bantuan kembali melalui perangkat daerah terkait	ROO.K7.25.03.36.28.01				Eksternal	C	Proses waktu Penerimaan bantuan harus membutuhkan waktu lama (N+1) dan berbelit-belit	
2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi													
64	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Risiko Kebijakan	Perencanaan	Belum optimalnya pelaksanaan KRENOVA sesuai kebijakan	ROO.KBJ8.25.03.36.28.01	Kepala Bidang LITBANG		Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait	Internal	C	Kebijakan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara menyeluruh	1. Pmda 2. Perangkat Daerah 3. Masyarakat
65				Pelaksanaan	Sosialisasi penilaian KRENOVA belum optimal	ROO.KBJ8.25.03.36.28.02			1. Pemberian materi yang kurang jelas 2. Penerima materi yang tidak optimal 3. Publikasi yang tidak maksimal	Internal dan Eksternal	C	Informasi yang diterima Perangkat Daerah dan masyarakat kurang jelas	
66			Risiko Kepatuhan	Pelaksanaan	Penilaian lomba Krenova tidak dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian	ROO.KPH8.25.03.36.28.01			1. Intervensi pihak tertentu 2. Penilaian tidak obyektif 3. Kurang pahamiannya Tim Penilai	Eksternal	C	Menurunnya kredibilitas lomba KRENOVA dan ketidakpuasan peserta	
67			Risiko Legal										
68			Risiko Fraud	Pelaksanaan	Kesalahan administrasi dalam pemberian hadiah lomba Krenova	ROO.F8.25.03.36.28.01			SDM Pemahaman administrasi belum optimal terkait teknis pemberian hadiah KRENOVA	Internal	C	Keterlambatan pencairan anggaran, ketidaktepatan alokasi dana, serta munculnya potensi masalah dalam pertanggungjawaban keuangan	
69			Risiko Reputasi	Evaluasi	Tingkat kepercayaan masyarakat dan Perangkat Daerah peserta lomba Krenova rendah	ROO.R8.25.03.36.28.01			Ketidakttransparan dalam pelaksanaan penilaian lomba KRENOVA	Internal dan Eksternal	C	Menurunnya partisipasi Perangkat Daerah dan masyarakat untuk mengikuti lomba KRENOVA	
70			Risiko Kemitraan	Evaluasi	Menurunnya minat peserta mengikuti lomba KRENOVA	ROO.K8.25.03.36.28.01			Penilaian KRENOVA yang tidak Obyektif	Internal dan Eksternal	C	Kualitas lomba KRENOVA kurang optimal	
D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah													
71	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Risiko Kebijakan	Perencanaan	Dokumen RTP Bappeda belum optimal	ROO.KBJ9.25.03.36.28.01	Sekretaris		1. Fasilitasi pendampingan RTP yang belum optimal 2. Monitoring dan evaluasi RTP yang belum dilaksanakan secara optimal	Internal dan Eksternal	C	Kualitas RTP Strategis dan Operasional Perangkat Daerah belum optimal	1. Pmda 2. Bappeda
72				Pelaksanaan	Sosialisasi RTP yang belum optimal	ROO.KBJ9.25.03.36.28.02			1. Narasumber yang kurang Jelas 2. Pemahaman Perangkat Daerah yang belum optimal	Internal dan Eksternal	C	Kategori risiko tidak teridentifikasi secara keseluruhan	1. Bappeda 2. Perangkat Daerah
73				Evaluasi	Belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi RTP secara optimal	ROO.KBJ9.25.03.36.28.03			SDM Tim Satgas SPIP yang belum optimal	Internal	C	Tidak bisa untuk menjadi acuan evaluasi RTP tahun berikutnya	1. Bappeda 2. Perangkat Daerah
74			Risiko Kepatuhan	Pelaksanaan	Belum teridentifikasinya risiko sesuai kebijakan	ROO.KPH9.25.03.36.28.01			Belum ada sosialisasi terkait ketegori risiko yang wajib dilaksanakan	Internal	C	Identifikasi risiko Bappeda yang minimum	1. Bappeda
75			Risiko legal	Pelaksanaan	-	-			-	-	-	-	

76			Risiko Fraud	Pelaksanaan	Jamuan makan minum rapat yang tidak efektif dan efisien	ROO.F9.25.03.36.28.01	Peserta bintek yang tidak serius dalam mengikuti kegiatan bintek	Internal dan eksternal	C	Terjadinya pemborosan pembiayaan pelaksanaan kegiatan	1. Pemd 2. Bappeda
77			Pelaksanaan	Honorarium Narasumber yang tidak efektif dan efisien	ROO.F9.25.03.36.28.02	C			Terjadinya pemborosan pembiayaan pelaksanaan kegiatan	1. Pemd 2. Bappeda	
78			Risiko Reputasi	Pelaksanaan	-	-			-	-	
79			Risiko Kemitraan	Pelaksanaan	-	-			-	-	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan kode risiko

Kolom g diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Moneu, Method, Machine*, dan *Material*.

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**FORMULIR KERTAS KERJA
HASIL ANALISIS RISIKO**

Nama PD : Bappeda Kabupaten Temanggung
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi
 Urusan Pemerintahan : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
Risiko Operasional Badan Perencanaan dan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
1	RKPD kurang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat	ROO.KBJ1. 25.03.36.28.01	4	3	12
2	Target kinerja pada program prioritas dalam dokumen RKPD tidak terlaksana dengan baik	ROO.KBJ1. 25.03.36.28.02	3	2	6
3	Koordinasi dengan pemerintah provinsi pusat belum optimal	ROO.KBJ1. 25.03.36.28.03	2	3	6
4	Kesulitan dalam mengukur kinerja	ROO.KBJ1. 25.03.36.28.04	2	3	6
5	Mengabaikan kebijakan terkait tata cara penyusunan dokumen perencanaan	ROO.KPH1. 25.03.36.28.01	2	2	4
6	Pembiayaan proses pelaksanaan pemesanan makan minum untuk rapat yang belum optimal	ROO.F1. 25.03.36.28.01	2	2	4
7	Ketidaksesuaian administrasi perjalanan dinas	ROO.F1. 25.03.36.28.02	3	4	12
8	Tingkat reputasi Bappeda rendah terhadap kevalidan data perencanaan pembangunan	ROO.R1. 25.03.36.28.01	2	2	4
9	Kerjasama atau kemitraan dengan pihak lain bisa menurun dan dapat menghentikan atau memperlambat pembangunan daerah	ROO.K1. 25.03.36.28.01	2	2	4
10	Input data di aplikasi SIPD e-walidata yang belum sesuai dengan kebijakan	ROO.KBJ2. 25.03.36.28.01	4	4	16
11	Mengidentifikasi data berdasarkan urusan yang belum sesuai	ROO.KBJ2. 25.03.36.28.02	3	2	6
12	Belum optimalnya melaksanakan desk dengan perangkat daerah	ROO.KBJ2. 25.03.36.28.03	3	2	6
13	Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi belum optimal	ROO.KBJ2. 25.03.36.28.04	2	2	4
14	Belum optimalnya hasil rapat evaluasi e-walidata dengan Perangkat Daerah	ROO.KBJ2. 25.03.36.28.05	2	2	4
15	Ketidaksesuaian input data di SIPD e-walidata	ROO.KPH2. 25.03.36. 28.01	3	2	6
16	Ketidaksesuaian pembiayaan fasilitasi rapat	ROO.F2. 25.03.36.28.01	3	4	12

17	Penurunan tingkat reputasi Bappeda karena tidak dianggap profesional oleh masyarakat dan Perangkat Daerah terhadap keakuratan data	ROO.R2. 25.03.36.28.01	2	2	4
18	Kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi terhadap Pemerintah Daerah menurun	ROO.K2. 25.03.36.28.01	2	2	4
19	Kesesuaian Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Pusat belum maksimal	ROO.KBJ3. 25.03.36.28.01	3	2	6
20	Input kinerja pembangunan masih secara manual	ROO.KBJ3. 25.03.36.28.02	4	4	16
21	Hasil desk capaian kinerja pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah belum optimal	ROO.KBJ3. 25.03.36.28.03	2	1	2
22	Terdapat Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah belum optimal	ROO.KPH3. 25.03.36. 28.01	4	2	8
23	Ketidaksesuaian pembiayaan fasilitasi rapat laporan kinerja Perangkat Daerah	ROO.F3. 25.03.36. 28.01	2	2	4
24	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah	ROO.R3. 25.03.36. 28.01	2	2	4
25	Tidak semua kegiatan dalam dokumen renja PD sesuai dengan kegiatan dalam dokumen Renstra Bidang Pemerintahan	ROO.KBJ4 25.03.36.28.01	4	2	8
26	Pelaksanaan Forum Internal PD yang belum maksimal	ROO.KBJ4 25.03.36.28.02	3	2	6
27	Terdapat kegiatan dalam dokumen Renja belum sesuai dalam dokumen Renstra pada Bidang Pemerintahan	ROO.KBJ4 25.03.36.28.03	4	2	8
28	Penyusunan dokumen perencanaan tidak berdasarkan dengan Tata Cara Penyusunan dokumen perencanaan	ROO.KPH4. 25.03.36.28.01	4	1	4
29	Ketidaksesuaian administrasi dengan pedoman pengelolaan keuangan	ROO.F4. 25.03.36.28.01	3	2	6
30	Tingkat kepercayaan masyarakat tentang perencanaan masih rendah terhadap Bappeda	ROO.R4. 25.03.36.28.01	2	2	4
31	Tidak semua kegiatan dalam dokumen renja PD sesuai dengan kegiatan dalam dokumen Renstra Bidang Perekonomian	ROO.KBJ5. 25.03.36.28.01	3	2	6
32	Pelaksanaan Forum Internal PD yang belum maksimal	ROO.KBJ5. 25.03.36.28.02	2	3	6
33	Terdapat kegiatan dalam dokumen Renja belum sesuai dalam dokumen Renstra pada Bidang Perekonomian	ROO.KBJ5 .25.03.36.28.03	4	1	4
34	Penyusunan dokumen perencanaan tidak berdasarkan dengan Tata Cara Penyusunan dokumen perencanaan	ROO.KPH5. 25.03.36.28.01	2	1	2

35	Ketidaksesuaian administrasi dengan pedoman pengelolaan keuangan	ROO.F5. 25.03.36.28.01	3	1	3
36	Tingkat kepercayaan masyarakat rendah tentang dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) Terhadap Bappeda	ROO.R5. 25.03.36.28.01	2	2	4
37	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ketepatan Waktu)	ROO.KBJ6. 25.03.36.28.01	3	2	6
38	Monitoring yang belum optimal	ROO.KBJ6. 25.03.36.28.02	3	2	6
39	Hasil monitoring yang belum sesuai	ROO.KBJ6. 25.03.36.28.03	3	2	6

40	Data perencanaan hasil monitoring dari Perangkat Daerah yang tidak akurat	ROO.KPH6. 25.03.36.28.01	4	2	8
41	Tingkat kepercayaan masyarakat terkait hasil monitoring data perencanaan Perangkat Daerah terhadap Bappeda rendah	ROO.R6. 25.03.36.28.01	2	2	4
42	Bantuan kepada masyarakat tidak melalui prosedur yang berlaku	ROO.KBJ7. 25.03.36.28.01	3	2	6
43	Penempatan KKN yang belum sesuai kebutuhan	ROO.KBJ7. 25.03.36.28.02	2	4	8
44	Belum ada kebijakan atau Juknis terkait KKN	ROO.KBJ7. 25.03.36.28.03	3	4	12
45	Administrasi forum TJSPL yang belum optimal	ROO.KBJ7. 25.03.36.28.04	4	4	16
46	Belum optimalnya koordinasi dengan BPKPAD terkait peraturan antuan dari pihak ketiga	ROO.KBJ7. 25.03.36.28.05	4	4	16
47	Terdapat aset terkait bantuan kepada masyarakat yang belum dilaporkan	ROO.KPH7. 25.03.36.28.01	3	3	9
48	Terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam penentuan lokasi KKN	ROO.F7. 25.03.36.28.01	4	3	12
49	Belum optimalnya Forum TFSLP memberikan bantuan kepada masyarakat	ROO.F7. 25.03.36.28.02	3	3	9
50	Tingkat kepercayaan pihak perusahaan kepada pemda rendah	ROO.R7. 25.03.36.28.01	2	2	4
51	Perusahaan enggan memberikan bantuan kembali melalui perangkat daerah terkait	ROO.K7. 25.03.36.28.01	2	2	4
52	Belum optimalnya pelaksanaan KRENOVA sesuai kebijakan	ROO.KBJ8. 25.03.36.28.01	4	2	8
53	Sosialisasi penilaian KRENOVA belum optimal	ROO.KBJ8. 25.03.36.28.02	3	2	6
54	Penilaian lomba Krenova tidak dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian	ROO.KPH8. 25.03.36.28.01	3	2	6
55	Kesalahan administrasi dalam pemberian hadiah lomba Krenova	ROO.F8. 25.03.36.28.01	4	3	12
56	Tingkat kepercayaan masyarakat dan Perangkat Daerah peserta lomba Krenova rendah	ROO.R8. 25.03.36.28.01	3	1	3
57	Menurunnya minat peserta mengikuti lomba KRENOVA	ROO.K8. 25.03.36.28.01	3	2	6
58	Dokumen RTP Bappeda belum optimal	ROO.KBJ9. 25.03.36.28.01	3	3	9
59	Sosialisasi RTP yang belum optimal	ROO.KBJ9. 25.03.36.28.02	3	2	6
60	Belum dilaksankannya monitoring dan evaluasi RTP secara optimal	ROO.KBJ9. 25.03.36.28.03	3	2	6
61	Belum teridentifikasinya risiko sesuai kebijakan	ROO.KPH9. 25.03.36.28.01	4	3	12
62	Jamuan makan minum rapat yang tidak efektif dan efisien	ROO.F9.25.03.36.28.01	3	2	6
63	Honorarium Narasumber yang tidak efektif dan efisien	ROO.F9.25.03.36.28.02	2	2	4

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai Form 3c

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

**FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian	: 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
Risiko Operasional Badan Perencanaan dan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						
1	RKPD kurang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat	ROO.KBJ1. 25.03.36.28.01	12	Kepala Bidang PEIPD	Regulasi kebijakan pemerintah pusat dikeluarkan setelah dokumen perencanaan pembangunan daerah ditetapkan	Kualitas perencanaan yang tidak optimal
2	Ketidaksesuaian administrasi perjalanan dinas	ROO.F1. 25.03.36.28.02	12	Kepala Bidang PEIPD	1. Kehadiran personil yang berlebih 2. Data dukung administrasi yang belum lengkap	Tidak keefisienannya pelaksanaan kegiatan dan anggaran
3	Input data di aplikasi SIPD e-walidata yang belum sesuai dengan kebijakan	ROO.KBJ2. 25.03.36.28.01	16	Kepala Bidang PEIPD	1. Kebijakan baru dari Pusat untuk memenuhi permintaan data yang harus segera dilaksanakan oleh daerah 2. Definisi operasional dalam aplikasi belum lengkap	Perangkat daerah belum optimal dalam mencukupi permintaan data yang dibutuhkan
4	Ketidaksesuaian pembiayaan fasilitasi rapat	ROO.F2. 25.03.36.28.01	12	Kepala Bidang PEIPD	Ketidaksesuaian antara administrasi dengan jenis pemesanan	Terjadinya pemborosan pembiayaan pelaksanaan kegiatan
5	Input kinerja pembangunan masih secara manual	ROO.KBJ3. 25.03.36.28.02	16	Kepala Bidang PEIPD	Aplikasi Pena Kita belum dipergunakan secara optimal	Laporan kinerja pembangunan belum terintegrasi
6	Belum ada kebijakan atau Juknis terkait KKN	ROO.KBJ7. 25.03.36.28.03	12	Kepala Bidang LITBANG	Kurangnya koordinasi Bappeda kepada Perangkat Daerah tentang kebutuhan KKN di masyarakat	Ketidaktepatan sasaran output terhadap masyarakat
7	Administrasi forum TJSPL yang belum optimal	ROO.KBJ7.25.03.36.28.04	16	Kepala Bidang LITBANG	Belum ada regulasi yang mengatur	1. Proses administrasi yang terhambat
8	Belum optimalnya koordinasi dengan BPKPAD terkait peraturan antuan dari pihak ketiga	ROO.KBJ7.25.03.36.28.05	16	Kepala Bidang LITBANG	Kurangnya pemahaman aturan pemberian bantuan dari TJSPL kepada masyarakat	Kesalahan administrasi
9	Terdapat aset terkait bantuan kepada masyarakat yang belum dilaporkan	ROO.KPH7. 25.03.36.28.01	9	Kepala Bidang LITBANG	Kurangnya pemahaman forum TJSPL terhadap alur pemberian bantuan	Pemberian bantuan menjadi terhambat
10	Terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam penentuan lokasi KKN	ROO.F7. 25.03.36.28.01	12	Kepala Bidang LITBANG	Benturan Kepentingan antara universitas atau Bappeda dengan lokasi KKN	Program pelaksanaan kegiatan KKN tidak optimal
11	Belum optimalnya Forum TFSPL memberikan bantuan kepada masyarakat	ROO.F7. 25.03.36.28.02	9	Kepala Bidang LITBANG	1. Tidak melalui prosedur 2. Kurangnya pemahaman forum TJSPL terhadap administrasi	1. Menghambat pemberian bantuan kepada masyarakat 2. Penyalahgunaan sumber daya
12	Kesalahan administrasi dalam pemberian hadiah lomba Krenova	ROO.R8. 25.03.36.28.01	12	Kepala Bidang LITBANG	SDM Pemahaman administrasi belum optimal terkait teknis pemberian hadiah KRENOVA	Keterlambatan pencairan anggaran, ketidaktepatan alokasi dana, serta munculnya potensi masalah dalam pertanggungjawaban keuangan
13	Dokumen RTP Bappeda belum optimal	ROO.KBJ9. 25.03.36.28.01	9	Sekretaris	1. Fasilitasi pendampingan RTP yang belum optimal 2. Monitoring dan evaluasi RTP yang belum dilaksanakan secara optimal	Kualitas RTP Strategis dan Operasional Perangkat Daerah belum optimal
14	Belum teridentifikasinya risiko sesuai kebijakan	ROO.KPH9. 25.03.36.28.01	12	Sekretaris	Belum ada sosialisasi terkait kategori risiko yang wajib dilaksanakan	Identifikasi risiko Bappeda yang minimum

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala risiko
Kolom e diisi dengan pemilik risiko
Kolom f diisi dengan penyebab
Kolom g diisi dengan dampak

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama PD	: Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian	: 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
Risiko Operasional Badan Perencanaan dan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah							
1	RKPD kurang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat	ROO.KBJ1. 25.03.36.28.01	Rapat Koordinasi	Rapat sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan perbaikan dan perubahan dokumen perencanaan	Kepala Bidang PEIPD	TW II Tahun 2025
2	Ketidaksesuaian administrasi perjalanan dinas	ROO.F1. 25.03.36.28.02	Juklak pedoman APBD	Ada kuitansi dinas, tanda terima pembayaran, Surat Perintah, Laporan Perjalanan Dinas, SPPD	Melampirkan dokumnetasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan mengoptimalkan verifikasi keuangan	Kepala Bidang PEIPD	Semester I Tahun 2025
3	Input data di aplikasi SIPD e-walidata yang belum sesuai dengan kebijakan	ROO.KBJ2. 25.03.36.28.01	Rapat Koordinasi dengan PD terkait, SK Tim e walidata	Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan sudah ada SK Tim e-Walidata	Fasilitasi pendampingan kepada Perangkat Daerah	Kepala Bidang PEIPD	Semester I dan II Tahun 2025
4	Ketidaksesuaian pembiayaan fasilitasi rapat	ROO.F2. 25.03.36.28.01	Juklak pedoman APBD, data dukung	Telah ada juklak pedoman APBD, dan data dukung tetapi belum lengkap	Melampirkan dokumentasi foto dalam pelaksanaan kegiatan dan mengoptimalkan verifikasi keuangan	Kepala Bidang PEIPD	Triwulan I Tahun 2025
5	Input kinerja pembangunan masih secara manual	ROO.KBJ3. 25.03.36.28.02	Rapat Koordinasi, Input data di excell, Desk,	Telah dilaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, input manual, SK Tim Desk IKUPD, dan melaksanakan desk	Membuat BA hasil Desk dengan Perangkat Daerah, dan mengoptimalkan input di aplikasi Pena Kita	Kepala Bidang PEIPD	Semester I dan II Tahun 2025
6	Belum ada kebijakan atau Juknis terkait KKN	ROO.KBJ7. 25.03.36.28.03	Rapat, Koordinasi	Telah dilaksanakan rapat koordinasi akan tetapi belum mampu menangani risiko yang diidentifikasi	Penyusunan Juknis atau SOP Pelaksanaan KKN	Kepala Bidang LITBANG	Semester I Tahun 2025
7	Administrasi forum TJSLP yang belum optimal	ROO.KBJ7. 25.03.36.28.04	Rapat Koordinasi dengan Forum TJSLP	Rapat Koordinasi dengan Forum TJSLP	Menyusun Rencana Kerja Forum TJSLP, membuat Nota Dinas laporan kegiatan TJSLP ke Sekda	Kepala Bidang LITBANG	TW III dan TW IV 2025
8	Belum optimalnya koordinasi dengan BPKPAD terkait peraturan antuan dari pihak ketiga	ROO.KBJ7. 25.03.36.28.05	Juklak Pedoman APBD	Terdapat Juklak Pedoman APBD	Koordinasi dengan BPKPAD	Kepala Bidang LITBANG	Semester II Tahun 2025
9	Terdapat aset terkait bantuan kepada masyarakat yang belum dilaporkan	ROO.KPH7. 25.03.36.28.01	Rapat Koordinasi terkait Asset	Telah melaksanakan rapat koordinasi terkait aset	Pencatatan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dan membuat laporan ke BPKPAD	Kepala Bidang LITBANG	Semester II Tahun 2025
10	Terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam penentuan lokasi KKN	ROO.F7. 25.03.36.28.01	Rapat dan Koordinasi	Telah Melaksanakan rapat dan koordinasi akan tetapi belum mampu menangani risiko yang diidentifikasi	Koordinasi lebih intensif kepada perangkat desa melalui kecamatan dan penyusunan tematik lokasi KKN	Kepala Bidang LITBANG	Semester I Tahun 2025
11	Belum optimalnya Forum TFSLP memberikan bantuan kepada masyarakat	ROO.F7. 25.03.36.28.02	Rapat koordinasi Forum TJSLP	Telah melaksanakan rapat koordinasi Forum TJSLP	Pendataan secara berkala terkait bantuan yang diberikan kepada masyarakat, membuat Pakta Integritas terkait pemberian bantuan kepada masyarakat	Kepala Bidang LITBANG	Semester II Tahun 2025
12	Kesalahan administrasi dalam pemberian hadiah lomba Krenova	ROO.R8. 25.03.36.28.01	Juklak Pedoman APBD	Telah ada juklak pedoman APBD	Koordinasi, membuat SK Bupati penerima hadiah lomba KRENOVA, memberikan hadiah KRENOVA Tk Perangkat Daerah melalui kegiatan di N+1	Kepala Bidang LITBANG	Semester II Tahun 2025
13	Dokumen RTP Bappeda belum optimal	ROO.KBJ9. 25.03.36.28.01	1. Perbup No 7 Tahun 2022 2. Sosialisasi 3. Koordinasi	Telah ada Perbup No 7 Tahun 2022, sosialisasi dan koordinasi	Fasilitasi pendampingan, Koordinasi secara intensif dengan PD terkait, melaksanakan monitoring dan evaluasi RTP Strategis dan Operasional	Sekretaris	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025

14	Belum teridentifikasinya risiko sesuai kebijakan	ROO.KPH9. 25.03.36.28.01	Perbup, Surat Edaran	Telah ada perbup No 7 Tahun 2022, Surat Edaran, dan Koordinasi	Melaksanakan identifikasi risiko strategis dan Operasional Bappeda berdasarkan kategori risiko sesuai kebijakan	Sekretaris	Semester II Tahun 2025
----	--	-----------------------------	----------------------	--	---	------------	------------------------

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya. Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama PD		: Bappeda Kabupaten Temanggung					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi					
Urusan Pemerintahan		: Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melaksanakan perbaikan dan perubahan dokumen perencanaan	1. Membuat Surat Perintah Tim Penyusun Perubahan Dokumen RKPD 2. Membuat surat undangan untuk rapat koordinasi 3. Rapat koordinasi persiapan penyusunan dokumen perubahan RKPD	Kepala Bidang PEIPD	Tim Penyusun Dokumen Perubahan RKPD dan Perangkat Daerah terkait	TW II Tahun 2025		
2	Melampirkan dokumnetasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan mengoptimalkan verifikator keuangan	1. Dokumentasi Foto pelaksanaan kegiatan 2. Cek List verifikator administrasi	Kepala Bidang PEIPD	1. PA 2. PPTK 3. Staf Administrasi 4. Verifikator administrasi	Semester I Tahun 2025		
3	Fasilitasi pendampingan kepada Perangkat Daerah	1. Membuat Surat Perintah Tim Verifikasi e wali data 2. Membuat surat undangan persiapan sosialisasi e walidata 3. Rapat persiapan sosialisasi e walidata bersama BPS dan Dinkominfo 4. Membuat surat undangan sosialisasi cara input ke aplikasi e walidata SIPD RI 5. Sosialisasi cara input ke aplikasi e walidata SIPD RI 6. Membuat surat undangan desk keterisian data pada aplikasi e walidata SIPD RI 7. Desk keterisian data pada aplikasi e walidata SIPD RI 8. Membuat surat penyampaian progres keterisian data pada aplikasi e walidata SIPD RI	Kepala Bidang PEIPD	Perangkat Daerah Terkait	Semester I dan II Tahun 2025		
4	Ketidaksesuaian pembiayaan fasilitasi rapat	1. Dokumentasi Foto pelaksanaan kegiatan 2. Cek List verifikator administrasi 3. Surat serah terima barang	Kepala Bidang PEIPD	1. PA 2. PPTK 3. Staf Administrasi 4. Verifikator administrasi	Triwulan I Tahun 2025		
5	Membuat BA hasil Desk dengan Perangkat Daerah, dan mengoptimalkan input di aplikasi Pena Kita	1. Berita Acara 2. Input di aplikasi Pena Kita	Kepala Bidang PEIPD	Perangkat Daerah Terkait	Semester I dan II Tahun 2025		
6	Penyusunan Juknis atau SOP Pelaksanaan KKN	1. Rapat Koordinasi 2. Membuat Juknis atau SOP Pelaksanaan kegiatan KKN	Kepala LITBANG	1. Perangkat Daerah Terkait 2. Bappeda 3. Akademisi 3. Masyarakat	Semester I Tahun 2025		

7	Menyusun Rencana Kerja Forum TJSPL, membuat Nota Dinas laporan kegiatan TJSPL ke Sekda	1. Rencan Kerja 2. Nota Dinas laporan kegiatan	Kepala LITBANG	1. Sekda 2. Forum TJSPL 3. Bappeda 4. PD Terkait	TW III dan TW IV 2025		
8	Koordinasi dengan BPKPAD	1. Koordinasi 2. Rapat dengan PD terkait dan Inspektorat	Kepala LITBANG	1. Perangkat Daerah Terkait 2. Bappeda	Semester II Tahun 2025		
9	Pencatatan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dan membuat laporan ke BPKPAD	1. Pencatatan data bantuan 2. Membuat laporan dan dilaporkan kepada BPKPAD	Kepala LITBANG	1. Forum TJSPL 2. BPKPAD	Semester II Tahun 2025		
10	Pendataan secara berkala terkait bantuan yang diberikan kepada masyarakat, membuat Pakta Integritas terkait pemberian bantuan kepada masyarakat	1. Pendataan secara berkala terkait bantuan kepada masyarakat 2. Pakta Integritas	Kepala LITBANG	1. BPKPAD 2. Bappeda 3 Forum TJSPL	Semester II Tahun 2025		
11	Koordinasi lebih intensif kepada perangkat desa melalui kecamatan dan penyusunan tematik lokasi KKN	1. Rapat Koordinasi 2. Membuat tematik lokasi KKN	Kepala LITBANG	1. Perangkat Daerah terkait 2. Bappeda 3.Perangkat Desa	Semester I Tahun 2025		
12	Koordinasi, membuat SK Bupati penerima hadiah lomba KRENOVA, memberikan hadiah KRENOVA Tk Perangkat Daerah melalui kegiatan di N+1	1. SK Bupati Penerima Hadiah kegiatan 2. Mengusulkan tambahan anggaran kegiatan bagi pemenang KRENOVA di Tk Perangkat Daerah	Kepala LITBANG	1. Masyarakat (Pemenang KRENOVA) 2. Perangkat Daerah Terkait	Semester II Tahun 2025		
13	Fasilitasi pendampingan, Koordinasi secara intensif dengan PD terkait, melaksanakan monitoring dan evaluasi RTP Strategis dan Operasional	1. Pendampingan 2. Koordinasi 3. Laporan Monitoring dan evaluasi RTP Strategis dan operasional Bappeda	Sekretaris	1. Inspektorat 2. Bappeda	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025		
14	Melaksanakan identifikasi risiko strategis dan Operasional Bappeda berdasarkan kategori risiko sesuai kebijakan	dokumen RTP Strategis dan operasional yang berisi kategori risiko sesuai kebijakan	Sekretaris	Bappeda	Semester II Tahun 2025		

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan media/bentuk sarana pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan penyedia informasi

Kolom e diisi dengan penerima informasi

Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan

Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan

Kolom h diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama PD : Bappeda Kabupaten Temanggung
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
1	Melaksanakan perbaikan dan perubahan dokumen perencanaan	1. Membuat Surat Perintah Tim Penyusun Perubahan Dokumen RKPD 2. Membuat surat undangan untuk rapat koordinasi 3. Rapat koordinasi persiapan penyusunan dokumen perubahan RKPD	Unit Kepatuhan	Triwulan III Tahun 2025		
2	Melampirkan dokumnetasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan mengoptimalkan verifikator keuangan	1. Dokumenntasi Foto pelaksanaan kegiatan 2. Cek List verifikator administrasi	Unit Kepatuhan	Triwulan II Tahun 2025		
3	Fasilitasi pendampingan kepada Perangkat Daerah	1. Membuat Surat Perintah Tim Verifikasi e wali data 2. Membuat surat undangan persiapan sosialisasi e walidata 3. Rapat persiapan sosialisasi e walidata bersama BPS dan Dinkominfo 4. Membuat surat undangan sosialisasi cara input ke aplikasi e walidata SIPD RI 5. Sosialisasi cara input ke aplikasi e walidata SIPD RI 6. Membuat surat undangan desk keterisian data pada aplikasi e walidata SIPD RI 7. Desk keterisian data pada aplikasi e walidata SIPD RI 8. Membuat surat penyampaian progres keterisian data pada aplikasi e walidata SIPD RI	Unit Kepatuhan	Triwulan II, IV Tahun 2025		
4	Ketidaksesuaian pembiayaan fasilitasi rapat	1. Dokumenntasi Foto pelaksanaan kegiatan 2. Cek List verifikator administrasi 3. Surat serah terima barang	Unit Kepatuhan	Triwulan II Tahun 2025		
5	Membuat BA hasil Desk dengan Perangkat Daerah, dan mengoptimalkan input di aplikasi Pena Kita	1. Berita Acara 2. Input di aplikasi Pena Kita	Unit Kepatuhan	Triwulan II, IV Tahun 2025		



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



LAMAN WEB



WHATSAPP



YOUTUBE



INSTAGRAM



SUREL